

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2016. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Indonesia periode Desember 2016, jumlah Bank Umum Syariah hingga tahun 2016 sebanyak 12 (dua belas) bank dan jumlah Unit Usaha Syariah hingga tahun 2016 sebanyak 22 (dua puluh dua) bank. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 12 (dua belas) bank yaitu bank umum syariah yang diambil berdasarkan metode *purposive sampling* dalam kurun waktu 2011-2016.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari rata-rata laporan keuangan bulanan bank syariah periode 2011-2016 yang memuat tentang *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) serta laporan bulanan yang memuat tentang Kurs dan Inflasi yang bersumber dari situs resmi Bank Indonesia. Seluruh data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 dilanjutkan uraian sejarah singkat masing-masing bank syariah.

Tabel 4.1.
Daftar Sampel Penelitian

1.	PT Bank Muamalat Indonesia.
2.	PT Bank Victoria Syariah.
3.	Bank BRISyariah.
4.	B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah.
5.	Bank BNI Syariah.
6.	Bank Syariah Mandiri.
7.	Bank Syariah Mega Indonesia.
8.	Bank Panin Syariah.
9.	PT Bank Syariah Bukopin.
10.	PT BCA Syariah.
11.	PT Maybank Syariah Indonesia.
12.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

Sumber: Statistik perbankan syariah Indonesia Desember 2016 telah diolah kembali.

1. PT Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, memulai kegiatan operasinya pada 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), beberapa pengusaha Muslim, dan dukungan dari masyarakat, terbukti komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System (MEPS)* sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk *shar-e gold* dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.¹

2. PT Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah yang dulu bernama PT. Bank Swaguna didirikan di kota Cirebon pada tahun 1966 dan mulai beroperasi tanggal 7 Januari 1967. Akuisisi saham PT. Bank Swaguna sebesar 99,80 % oleh PT. Bank Victoria International Tbk telah disetujui oleh Bank Indonesia pada

¹<http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>. Bank Muamalat. *Profil Bank Muamalat* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:35.

tanggal 3 Agustus 2007. Pada september 2007 Bank telah meningkatkan modal disetor menjadi Rp 90 miliar dan pada Maret 2008 modal disetor Bank meningkat menjadi Rp 110 miliar. Tanggal 19 Agustus 2009 Kantor Pusat pindah dari Jl. Fatmawati No.85-A Jakarta Selatan ke Permata Senayan Blok E 52-55 Jl. Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210. PT. Bank Victoria Syariah telah mendapatkan Izin Operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Dan 1 April 2010 beroperasi secara penuh dengan system syariah. Saat ini Bank memiliki satu kantor pusat, tujuh kantor cabang, dan enam kantor cabang pembantu, yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Serang, Bandung, Cirebon, Tegal, Solo dan Denpasar.²

Menghadapi kompetisi antarbank yang semakin ketat, sektor perbankan dituntut untuk terus berinovasi baik dari sisi produk, layanan maupun operasional, yang berujung pada peningkatan kinerja usaha. Untuk itu, di tahun 2013 Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk memperkokoh pondasi perusahaan sebagai bank ritel syariah dengan melakukan pengembangan produk dan segmen bisnis baru untuk percepatan pertumbuhan aset perusahaan. Hingga akhir 2013, Bank telah memiliki 8 produk pendanaan serta 5 produk pembiayaan yang semakin melengkapi kebutuhan finansial masyarakat Indonesia. Selain mengoptimalkan fondasi bisnis ritel yang sudah ada serta diversifikasi produk dan jasa untuk segmen bisnis baru, Bank Victoria Syariah juga berkomitmen untuk melakukan penerapan *good corporate governance* pada semua aspek. Melalui sejumlah langkah tersebut, diharapkan di tahun mendatang, produktifitas bisnis maupun operasi akan meningkat, dan memperkuat posisi Bank Victoria Syariah sebagai bank ritel syariah Nasional.³

3. PT Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya

²https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Victoria_Syariah. Bank Victoria Syariah. *Profil Bank Victoria Syariah* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:38.

³<http://bankvictoriasyariah.co.id/>. Bank Victoria Syariah. *Profil Bank Victoria Syariah* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:38.

o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.⁴

4. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Syariah

Pendirian Bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah sepuluh tahun operasional Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan

⁴<http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>. Bank BRI Syariah. *Profil Bank BRI Syariah* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:40.

share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Pada tanggal 6 Mei 2010 Bank BJB Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan *cut off* dari Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal Bank BJB Syariah. Hingga saat ini Bank BJB Syariah yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki delapan kantor cabang, empat puluh empat kantor cabang pembantu, empat puluh enam jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan bank bjb semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.⁵

5. PT Bank BNI Syariah

Krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

⁵<http://bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/sekilas-bjb-syariah/>. Bank BJB Syariah. *Profil Bank BJB Syariah* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:42.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Hingga bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.⁶

6. PT Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.

⁶<http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>. Bank BNI Syariah. *Profil Bank BNI Syariah* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:44.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 23 tanggal 8 September 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁷

7. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Dulu PT Bank Syariah Mega Indonesia bernama PT Bank Umum Tugu. Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora, PT Para Global Investindo, dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah

⁷<https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>. Bank Syariah Mandiri. *Profil Bank Syariah Mandiri* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:46.

perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia. Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.⁸

8. PT Bank Panin Syariah

Bank Panin Syariah kini berganti nama menjadi Bank Panin Dubai Syariah sudah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 September 2015. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

Komposisi kepemilikan saham posisi periode 31 desember 2016 yaitu PT Bank Panin Tbk. sebesar 51,61%, Dubai Islamic Bank sebesar 39,32%, dan masyarakat 9,07%. Bank Panin Dubai Syariah memiliki tujuan untuk dapat

⁸<http://www.megasyariah.co.id/>. Bank Mega Syariah. *Profil Bank Mega Syariah* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:48.

menjadi mitra ekonomi masyarakat. Mempunyai visi yaitu Bank Syariah pilihan yang menjadi *role model* berbasiskan Kemitraan dan Ekonomi Rakyat dan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Menyediakan produk dan layanan yang kreatif, inovatif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
2. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat
3. Mengembangkan sumber daya insani berintegritas dan profesional berlandaskan nilai-nilai spiritual berbasis sistem merit
4. Menerapkan tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian yang terintegrasi sesuai prinsip syariah.
5. Meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholder*.⁹

9. PT Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha dua Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh

⁹<https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami>. Bank Panin Syariah. *Profil Bank Panin Syariah* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:50.

persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu satu kantor pusat dan operasional, sebelas kantor cabang, tujuh kantor cabang pembantu, empat kantor kas, satu unit mobil kas keliling, dan tujuh puluh enam kantor layanan syariah, serta dua puluh tujuh mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.¹⁰

10. PT Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Komposisi kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah yaitu PT Bank Central Asia Tbk. sebesar 99.9999% dan PT BCA Finance sebesar 0.0001%. BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah perseorangan, mikro, kecil dan menengah. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

¹⁰<http://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>. Bank Bukopin Syariah. *Profil Bank Bukopin Syariah* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:52.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. BCA Syariah hingga saat ini memiliki empat puluh sembilan jaringan cabang yang terdiri dari sembilan kantor cabang, tiga kantor cabang pembantu, tiga kantor cabang pembantu mikro bina usaha rakyat, delapan kantor fungsional, dan dua puluh enam unit layanan syariah yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo dan Yogyakarta (data per Agustus 2016).¹¹

11. PT Maybank Syariah Indonesia

Bank Maybank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan perbankan yang beroperasi di Indonesia. Bank ini dahulu bernama Bank Maybank Indocorp atau Unit Usaha Syariah Malayan Banking Berhad Indonesia yang merupakan bank *joint venture* antara Maybank dengan Bank Nusa Nasional. Sejak 2010, berubah menjadi bank syariah.¹²

Sejak mulai beroperasi sebagai bank Islam pada bulan Oktober 2010, PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) telah mengembangkan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami serta peluang di pasar keuangan regional yang terus berkembang. Sekarang, posisi Maybank Syariah sendiri sebagai perantara keuangan dan penghubung antara Malaysia dan Indonesia. Maybank Islamic merupakan anak perusahaan dari Maybank Group, terbesar lembaga jasa keuangan Malaysia dengan total aset lebih dari Rp 100 miliar, serta salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Malaysia Saham (Stock Exchange). Beroperasi di jantung ASEAN, Maybank adalah bisnis jasa keuangan kelompok itu di Malaysia dengan penyebaran jaringan internasional lebih dari 14 negara. Anak perusahaan dari sektor perbankan Maybank syariah Maybank

¹¹<http://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/profil-perusahaan/>. Bank BCA Syariah. *Profil Bank BCA Syariah* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:54.

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Maybank_Syariah_Indonesia. Bank Maybank Syariah. *Profil Bank Maybank Syariah* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:55.

Islamic Berhad, bank Islam terbesar komersial di kawasan Asia Pasifik dan termasuk Top 20 lembaga keuangan Islam di dunia. Oleh karena itu Maybank Syariah Grup Maybank dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman di Indonesia selama 15 tahun untuk memberikan solusi keuangan terbaik kepada pelanggannya.¹³

12. PT BTPN Syariah

BTPN Syariah adalah Bank Umum Syariah ke 12 di Indonesia, memiliki tekad untuk menumbuhkan jutaan rakyat Indonesia sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik. Sesuai dengan slogan ini BTPN Syariah ingin menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif dan dapat mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Melalui produk dan aktivitasnya, BTPN Syariah senantiasa mengajak dan melibatkan seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama memberikan kemudahan akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan produk dan layanan jasa bank (*financial inclusion*), memberikan informasi, serta kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur.

BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu, PT Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakusisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), pada 20 Januari 2014, dan kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga pra sejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sejak Maret 2008, kemudian di *spin off* dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juli 2014.¹⁴

¹³<http://maybanksyariah.co.id/pages/27/in-a-glance>. Bank Maybank Syariah. *Profil Maybank Syariah* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 19:57.

¹⁴<https://www.btpnsyariah.com/tentang-kami/profil>. Bank BTPN Syariah. *Profil Bank BTPN Syariah* (online). Diunduh pada tanggal 11 April 2017, jam 20:00.

B. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) merupakan Bank Pembangunan Islami yang menjadi motivasi berdirinya bank-bank Islam di berbagai negara. Komite ahli IDB bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirin, peraturan dan pengawasan bank syariah. Kerja keras mereka pun membuahkan hasil dan bank-bank syariah mulai bermunculan di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, Siprus, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Turki. Hal ini yang kemudian juga mempengaruhi Indonesia untuk mendirikan bank syariah. Pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya yang kemudian menghasilkan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Kemudian lahirnya PT Bank Muamalat Indonesia yang akte pendiriannya ditanda tangani pada tahun 1991. Namun pada awal pendiriannya, belum mendapatkan perhatian yang baik dan landasan hukumnya hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.¹⁵

Perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa pada era reformasi, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah. Kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Selanjutnya Bank Indonesia juga memberikan ijin untuk pembukaan bank syariah baru maupun ijin kepada bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Pada tahun 2008 merupakan tahun pematapan bisnis bank syariah di Indonesia yang memperkokoh dan memantapkan upaya pengembangan bank syariah di Indonesia.¹⁶ Yaitu dengan disahkannya UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memberikan landasan yang cukup luas bagi berdirinya perbankan

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio. *BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 21-26.

¹⁶Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *ISLAMIC BANKING Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm.132.

syariah di Indonesia, hingga dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun telah bermunculan beberapa bank syariah.¹⁷

1. Gambaran Umum Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip islam berlandaskan al-qur'an dan al hadits. Dalam kegiatan operasionalnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Umum Konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya BUK, BUS berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.¹⁸

BUS memiliki struktur organisasi yang sama dengan BUK, suatu keharusan mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Penetapan keanggotaannya dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan ketua, sekretaris, dan beberapa anggota. DSN mempunyai fungsi mengawasi produk-produk bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan membuat garis besar panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Selain itu, DSN juga berfungsi meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan di lembaga yang bersangkutan. Selain itu juga dapat memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada suatu lembaga dan memberikan teguran apabila menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Teguran dilakukan jika DSN telah menerima laporan dari DPS dan akan diteruskan kepada otoritas berwenang seperti Bank Indonesia untuk memberikan sanksi agar tidak mengembangkan lebih jauh tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.¹⁹

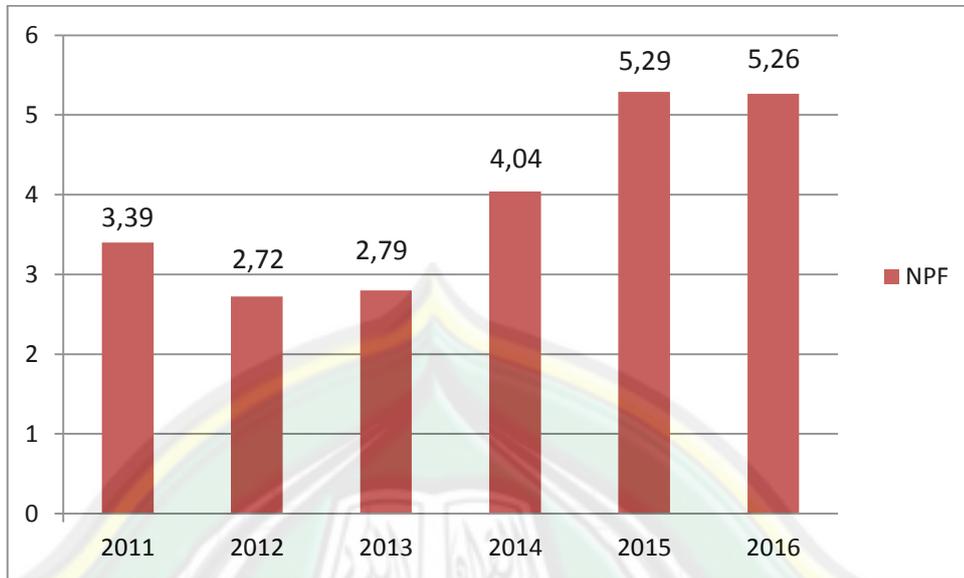
¹⁷*Ibid.*, hlm. 102.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 163.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.cit.*, hlm.30-33.

2. Gambaran Umum Data Penelitian

a. Perkembangan *Non Performing Financing*



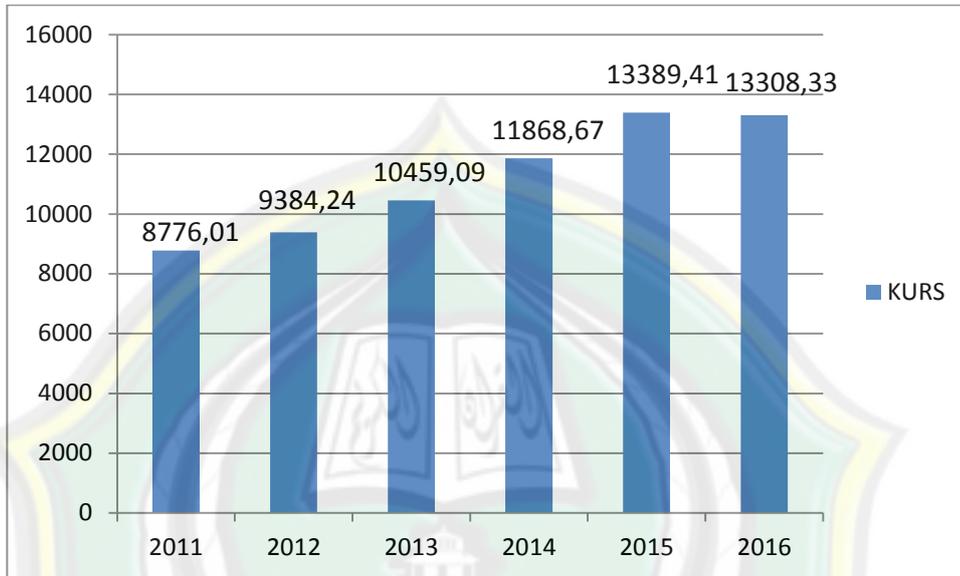
Berdasarkan diagram diatas, terlihat bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Mulai pada tahun 2011 hingga 2013 berhasil mengalami penurunan, namun naik kembali pada tahun 2014 dan 2015. Hingga pada akhir periode NPF mencapai angka lebih dari 5% yang artinya NPF masih dalam kategori tinggi.

b. Perkembangan *Financing to Deposit Ratio*



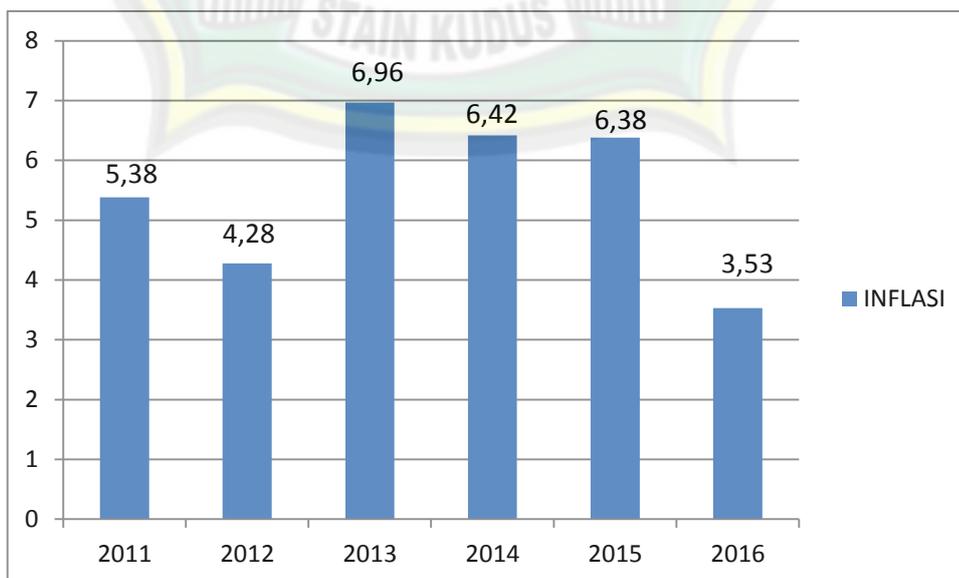
Berdasarkan diagram diatas, terlihat bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami fluktuasi dengan nilai yang wajar yaitu antara 80%-100%. Pada tahun 2013, FDR mempunyai angka yang melebihi 100%. Namun dapat diatasi sehingga pada tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami penurunan.

c. Perkembangan Kurs



Berdasarkan diagram diatas, terlihat bahwa Kurs selalu mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, namun mengalami penurunan pada tahun 2016 dari 13389,41 menjadi 13308,33.

d. Perkembangan Inflasi



Berdasarkan diagram diatas, terlihat bahwa Inflasi mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Berada pada digit 6 pada 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Kemudian mengalami penurunan pada akhir periode yaitu sebesar 3,53

C. Hasil Penelitian

Data yang diteliti merupakan data runtun waktu (*time series*), yaitu data yang dilakukan berdasarkan observasi pada waktu yang berbeda. Data seperti ini dikumpulkan secara harian, mingguan, bulanan, kuartalan, maupun tahunan.²⁰ Data yang diolah mencakup data bulanan dalam kurun waktu 2011-2016. Analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu statistik yang berfungsi untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²¹ Hasil statistik deskriptif untuk variabel dependen (NPF) dan variabel independen (FDR, Kurs, Inflasi) berdasarkan hasil pengolahan data dengan program evIEWS 7 ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Statistik Deskriptif

	NPF	FDR	KURS	INFLASI
Mean	3.919167	94.98528	11197.63	5.492778
Median	3.630000	94.95000	11480.85	4.860000
Maximum	6.170000	104.8300	14396.10	8.790000
Minimum	2.220000	85.99000	8532.000	2.790000
Std. Dev.	1.128268	5.839769	1867.426	1.674115
Skewness	0.293114	0.025257	0.003840	0.337622
Kurtosis	1.604509	1.535243	1.446691	1.925102
Jarque-Bera	6.873175	6.444192	7.238480	4.834079
Probability	0.032174	0.039871	0.026803	0.089185
Sum	282.1800	6838.940	806229.1	395.4800
Sum Sq. Dev.	90.38215	2421.306	2.48E+08	198.9890
Observations	72	72	72	72

Sumber: Lampiran.

²⁰Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate denagn Program SPSS*. Undip, Semarang, 2006, hlm. 53.

²¹Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 207.

Tabel 4.2. menggambarkan deskripsi variabel-variabel secara statistik dalam penelitian ini. *Mean* adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi banyaknya data, *maximum* adalah nilai terbesar dalam hasil pengamatan, *minimum* adalah nilai terkecil dalam hasil pengamatan, sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi banyaknya data. Tabel 4.2. menunjukkan deskriptif variabel penelitian dengan jumlah data sebanyak 72 data adalah sebagai berikut:

1. Data NPF mempunyai nilai *minimum* sebesar 2,22%, nilai *maximum* sebesar 6,71%, *mean* sebesar 3,92% dengan standar deviasi sebesar 1,13% yang artinya lebih kecil dari *mean*, sehingga tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari variabel NPF.
2. Data FDR mempunyai nilai *minimum* sebesar 85,99%, nilai *maximum* sebesar 104,83%, *mean* sebesar 94,98% dengan standar deviasi sebesar 5,84% yang artinya lebih kecil dari *mean*, sehingga tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari variabel FDR.
3. Data Kurs mempunyai nilai *minimum* sebesar 8532,00%, nilai *maximum* sebesar 14396,10%, *mean* sebesar 11197,63% dengan standar deviasi sebesar 1867,43% yang artinya lebih kecil dari *mean*, sehingga tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari variabel Kurs.
4. Data Inflasi mempunyai nilai *minimum* sebesar 2,79%, nilai *maximum* sebesar 8,79%, *mean* sebesar 5,49% dengan standar deviasi sebesar 1,67% yang artinya lebih kecil dari *mean*, sehingga tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari variabel Inflasi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kurs, dan Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program *evIEWS 7* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Hasil perhitungan regresi

Dependent Variable: NPF
Method: Least Squares
Date: 04/07/17 Time: 20:12
Sample: 1 72
Included observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.760946	1.605424	4.211316	0.0001
FDR	-0.074715	0.014840	-5.034799	0.0000
KURS	0.000378	4.20E-05	9.008024	0.0000
INFLASI	0.003585	0.045337	0.079072	0.9372
R-squared	0.774561	Mean dependent var	3.919167	
Adjusted R-squared	0.764616	S.D. dependent var	1.128268	
S.E. of regression	0.547395	Akaike info criterion	1.686661	
Sum squared resid	20.37562	Schwarz criterion	1.813142	
Log likelihood	-56.71980	Hannan-Quinn criter.	1.737014	
F-statistic	77.87812	Durbin-Watson stat	0.525244	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: *output eviews 7.*

Berdasarkan tabel diatas, maka hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen dalam model dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF_{it} = 6,760946 - 0,074715FDR_{it} + 0,000378KURS_{it} + 0,003585INFLASI_{it} + e$$

Berdasarkan model diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta menunjukkan angka 6,760946. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya pengaruh variabel-variabel independen (FDR, Kurs, Inflasi) atau variabel-variabel independen (FDR, Kurs, Inflasi) dianggap konstan, maka besarnya variabel dependen (NPF) adalah sebesar 6,760946 satuan.
2. Koefisien regresi FDR sebesar -0,074715. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan FDR sebesar 1satuan dan variabel lain dianggap konstan maka akan menurunkan FDR sebesar 0,074715satuan.
3. Koefisien regresi Kurs sebesar 0.000378. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan Kurs sebesar 1satuan dan variabel lain dianggap konstan maka akan menurunkan Kurs sebesar 0.000378 satuan.

4. Koefisien regresi Inflasi sebesar 0,003585. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan Inflasi sebesar 1 satuan dan variabel lain dianggap konstan maka akan menurunkan Inflasi sebesar 0,003585 satuan.

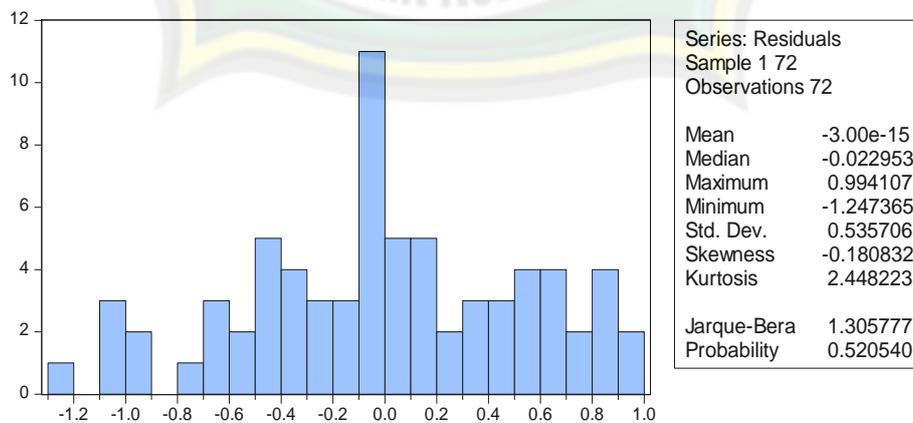
1. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan sajian data hasil statistik deskriptif, maka sebelum dilakukan pengujian hipotesis diperlukan beberapa pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Masing-masing pengujian dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki variabel pengganggu atau *residual* berdistribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak dipenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk sampel ukuran kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara yang paling mudah untuk mendeteksi tetapi bisa menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.²² Dibawah ini adalah *output* hasil uji normalitas terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Hasil Uji Normalitas



Sumber: *output* telah diolah.

²²*Ibid*, hlm.165.

Pengujian hipotesis normalitas yaitu:

H_0 berarti residual berdistribusi normal

H_a berarti residual tidak berdistribusi normal

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel diatas, diketahui nilai $p\text{-value} > \alpha$ yaitu $0,520540 > 0,05$. Hal itu menunjukkan bahwa H_0 diterima yang artinya dapat dikatakan bahwa residual mempunyai distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara semua atau sebagian variabel yang menjelaskan dari model regresi. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diketahui atau dilihat dari korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas mempunyai nilai lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya jika koefisien korelasi antar variabel bebas mempunyai nilai lebih kecil dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinieritas.²³ Selanjutnya jika antar variabel independen terjadi multikolinieritas sempurna, maka koefisien regresi variabel bebas tidak dapat ditentukan dan nilai *standar error* menjadi tak terhingga. Sedangkan jika multikolinieritas antar variabel bebas tidak sempurna tetapi tinggi, maka koefisien regresi variabel bebas dapat ditentukan tetapi memiliki nilai *standar error* tinggi yang artinya nilai koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan tepat.²⁴ Dibawah ini adalah *output* hasil uji multikolinieritas terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Hasil Uji Multikolinieritas

Correlation Matrix

	NPF	FDR	KURS	INFLASI
NPF	1.000000	-0.687659	0.813586	-0.130896
FDR	-0.687659	1.000000	-0.484354	0.427916
KURS	0.813586	-0.484354	1.000000	0.046749
INFLASI	-0.130896	0.427916	0.046749	1.000000

Sumber: *output* telah diolah.

²³*Ibid*, hlm.35.

²⁴Imam Ghozali dan Dwi Ratmono. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Undip, Semarang, 2013, hlm.77.

Berdasarkan pada hasil output matrik korelasi antara FDR dan Inflasi sebesar 0,43, korelasi antara FDR dan Kurs sebesar -0,48 dan korelasi antara Inflasi dan Kurs sebesar 0,047. Jadi disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel independen karena semua variabel mempunyai nilai kurang dari 0,8.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul biasanya disebabkan oleh residual atau kesalahan pengganggu dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.²⁵ Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Cara pertama, dengan memperhatikan nilai t-statistik, R^2 , uji F, dan Durbin Watson.
- b. Cara kedua, dapat dilakukan dengan uji LM (metode *Bruesch Godfrey*). Metode ini didasarkan pada nilai F dan Obs*R-Squared, dimana jika nilai probabilitas dari Obs*R-Squared melebihi tingkat kepercayaan, maka H_0 diterima yang artinya tidak terdapat masalah autokorelasi.²⁶

Dibawah ini adalah *output* hasil uji autokorelasi terdapat pada tabel sebagai berikut:

²⁵Imam Ghozali. *Op.cit.*, hlm.79-80

²⁶Shochrul Rohmatul Ajija et.al. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm.40.

Tabel 4.6.
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	38.78068	Prob. F(2,66)	0.0000
Obs*R-squared	38.89917	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 04/07/17 Time: 20:20

Sample: 1 72

Included observations: 72

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.743933	1.126633	-0.660315	0.5113
FDR	0.007577	0.010450	0.725018	0.4710
KURS	2.40E-06	2.89E-05	0.082818	0.9342
INFLASI	-0.002504	0.031258	-0.080111	0.9364
RESID(-1)	0.724173	0.124474	5.817876	0.0000
RESID(-2)	0.046602	0.128505	0.362649	0.7180
R-squared	0.540266	Mean dependent var	-3.00E-15	
Adjusted R-squared	0.505438	S.D. dependent var	0.535706	
S.E. of regression	0.376736	Akaike info criterion	0.965109	
Sum squared resid	9.367359	Schwarz criterion	1.154831	
Log likelihood	-28.74392	Hannan-Quinn criter.	1.040638	
F-statistic	15.51227	Durbin-Watson stat	1.942536	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: *output* telah diolah.

Pengujian hipotesis autokorelasi yaitu:

H_0 berarti tidak ada korelasi serial

H_a berarti ada korelasi serial

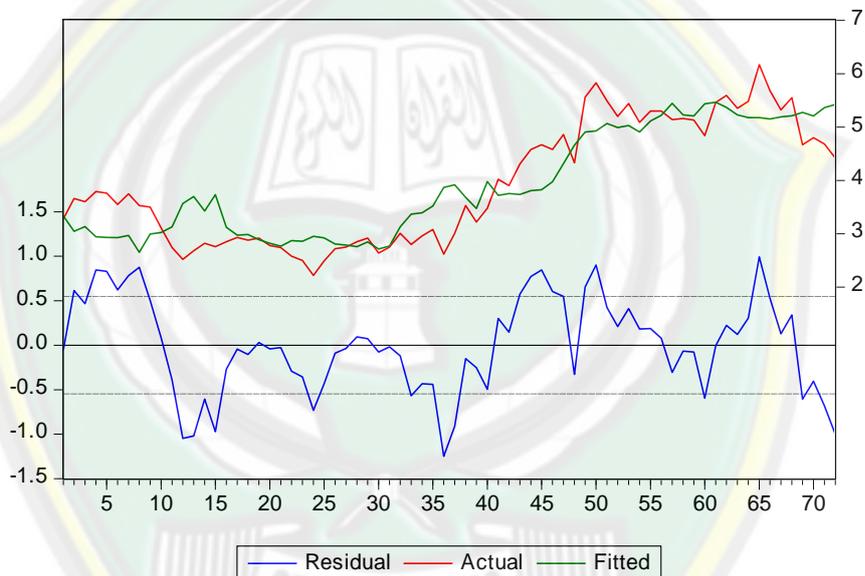
Berdasarkan hasil *output* menggunakan uji LM (metode *bruesch godfrey*) didapatkan hasil *p-value* Obs*R-squared sebesar $0,0000 < 0,05$. Maka H_0 yang menyatakan model tidak terdapat autokorelasi diterima dan H_a yang menyatakan model terdapat autokorelasi ditolak. Jadi disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan keadaan di mana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat pola residual dari hasil estimasi regresi. Jika residual bergerak konstan, maka tidak terdeteksi masalah heteroskedastisitas. Akan tetapi, jika residual membentuk pola tertentu, maka hal tersebut mengindikasikan terjadi masalah heteroskedastisitas.²⁷ Dibawah ini adalah *output* hasil uji heteroskedastisitas terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: *output* telah diolah.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, terlihat pola residual dari hasil estimasi bergerak konstan dan tidak membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Signifikansi

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil uji t-statistik pada hasil regresi dengan t-tabel. Jika nilai t-statistik > t-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara variabel dependen

²⁷Shochrul Rohmatul Ajija et.al. *Op.cit.*,hlm.36.

dan variabel independen. Sebaliknya, jika t -statistik $<$ t -tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dan independen. Selain dengan cara tersebut, pengujian hipotesis dapat juga dilakukan dengan konsep p -value. Konsep ini membandingkan α dengan nilai p -value. Jika nilai p -value kurang dari α , maka H_0 ditolak.²⁸ Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8.

Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.760946	1.605424	4.211316	0.0001
FDR	-0.074715	0.014840	-5.034799	0.0000
KURS	0.000378	4.20E-05	9.008024	0.0000
INFLASI	0.003585	0.045337	0.079072	0.9372

Sumber: *output* telah diolah.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil uji F-statistik pada hasil regresi dengan F-tabel. Jika nilai F-statistik $>$ F-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Sebaliknya, jika F-statistik $<$ F-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dan independen. Selain dengan cara tersebut, pengujian hipotesis dapat juga dilakukan dengan konsep p -value. Konsep ini membandingkan α dengan nilai p -value. Jika nilai p -value kurang dari α , maka H_0 ditolak.²⁹ Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.9.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm.34.

Tabel 4.9.
Hasil Uji F

R-squared	0.774561	Mean dependent var	3.919167
Adjusted R-squared	0.764616	S.D. dependent var	1.128268
S.E. of regression	0.547395	Akaike info criterion	1.686661
Sum squared resid	20.37562	Schwarz criterion	1.813142
Log likelihood	-56.71980	Hannan-Quinn criter.	1.737014
F-statistic	77.87812	Durbin-Watson stat	0.525244
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *output* telah diolah.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen menggunakan uji Koefisien Determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.³⁰ Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10.
Hasil Uji R^2

R-squared	0.774561	Mean dependent var	3.919167
Adjusted R-squared	0.764616	S.D. dependent var	1.128268
S.E. of regression	0.547395	Akaike info criterion	1.686661
Sum squared resid	20.37562	Schwarz criterion	1.813142
Log likelihood	-56.71980	Hannan-Quinn criter.	1.737014
F-statistic	77.87812	Durbin-Watson stat	0.525244
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *output* telah diolah.

Berdasarkan Tabel 4.10. diatas, terlihat bahwa besarnya nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan *adjusted R²* sebesar 0,765 yang berarti variasi tiga variabel independen yaitu FDR, Kurs, dan Inflasi mampu menjelaskan 76,5% variasi variabel NPF. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio (X1)*, Kurs, dan Inflasi mampu memberikan kontribusi pengaruh

³⁰Shochrul Rohmatul Ajija et.al. *Op.cit.*, hlm. 88.

terhadap *Non Performing Financing* (Y) sebesar 76,5% sedangkan sisanya 23,5% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti.

D. Pembahasan

1. Pengaruh FDR terhadap NPF

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diperoleh hasil dengan arah negatif, nilai t statistik sebesar 5,034799 dan t tabel sebesar 1,99547 (t statistik > t tabel) dan nilai probabilitas atau *p value* dari variabel FDR sebesar $0,0000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima tetapi dengan arah negatif, yang berarti variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini berarti *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Keadaan ini memberikan indikasi bahwa FDR akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan *Non Performing Financing* (NPF). Kenaikan dan penurunan dari FDR akan membawa pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Semakin rendah FDR akan memberikan kontribusi terhadap semakin tingginya *Non Performing Financing* (NPF) atau dengan kata lain, semakin rendahnya FDR akan membawa pengaruh terhadap tingginya *Non Performing Financing* (NPF).

Bank wajib menyediakan likuiditas dengan cukup dan mengelolanya dengan baik karena likuiditas yang terlalu kecil akan mengganggu kegiatan operasional bank. Likuiditas juga tidak boleh terlalu besar, jika terlalu besar maka likuiditas akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Selanjutnya jika bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun memenuhi kebutuhan dana yang mendesak maka akan muncul risiko likuiditas.³¹

³¹Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.183.

Sejak dulu dunia perbankan memerlukan likuiditas karena telah menjadi salah satu faktor penting dalam hal pengelolaan dananya. Harus ada nasabah yang menyimpan uang dibank, apabila bank ingin melanjutkan usahanya dan diperlukan likuiditas yang cukup, apabila bank ingin memenuhi permintaan kredit yang tidak terduga dari nasabah. Penolakan permintaan kredit akan mengakibatkan kehilangan nasabah yang akan menyimpan uangnya atau bahkan kehilangan calon nasabah prima. Jadi bank harus berlindung dari risiko likuiditas dengan mempertahankan tingkat likuiditas tertentu atau harus mampu menyediakan dana dalam rangka mendapatkan likuiditas yang memadai.³²

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank maka akan memberikan konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini bank. Apabila pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat. Bank Indonesia membatasi rasio antara pembiayaan dibandingkan dengan simpanan masyarakat bank yang bersangkutan. FDR dibatasi hanya sampai dengan 110% dan pengertian deposit diperlunak (deposit tidak hanya dana pihak ketiga tetapi juga modal sendiri).³³ Menurut hasil penelitian Zakiyah dan Yulizar³⁴ yang menyatakan bahwa FDR mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hal itu mengindikasikan bahwa pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah pada setiap nasabahnya, berkualitas baik, sehingga ekspansi pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah dapat meningkatkan *return* bank dan menurunkan tingkat NPF.

Menurut Ihda³⁵, hubungan FDR dan NPF bernilai negatif disebabkan karena jika bank mengeluarkan kredit lebih banyak maka tingkat pembiayaan bermasalah akan turun. Jika alasan pembiayaan bermasalah lebih disebabkan

³²Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Op.cit.*,hlm.552.

³³Khaerul Umam. *Op.cit.*, hlm.345.

³⁴Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar D Sanrego. Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah. *Jurnal TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, Volume 6 Nomor 2, 2011, hlm.95.

³⁵Ihda A. Faiz. Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap Krisis Keuangan Global. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV Nomor 2, 2010, hlm 231.

oleh faktor teknis, besarnya alokasi pinjaman harusnya akan menambah jumlah kredit bermasalah. Artinya faktor penyebab kredit bermasalah tidak semata aspek teknis tetapi variabel yang lebih kompleks melibatkan keperilakuan dan aspek makro yaitu inflasi, suku bunga, dan sebagainya.

Jika pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tinggi maka akan menghasilkan keuntungan yang tinggi, sesuai dengan besarnya risiko yang nanti akan ditanggung oleh pihak bank. Dan untuk menghindari munculnya hal tersebut, bank mempunyai suatu komite yang disebut dengan ALCO (*assets liabilities management committee*) yang bertugas memaksimalkan laba, menjamin ketersediaan likuiditas yang cukup dan meminimalisir risiko. Selain itu juga dalam memberikan penyaluran pembiayaan, bank syariah akan melakukan seleksi yang ketat pada pengajuan pembiayaan calon nasabahnya. Hanya yang sesuai kriteria yang akan mendapatkan pembiayaan. Jadi pihak bank syariah tidak perlu mengkhawatirkan akan terjadi NPF yang tinggi.

Dengan demikian, hipotesis 1 yang menyatakan “*Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*” dinyatakan ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah dan Yulizar tahun 2011 yang menunjukkan FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, berbeda dengan penelitian Chandra dan Monita pada 2013 yang menunjukkan pengaruh positif signifikan.³⁶

2. Pengaruh Kurs terhadap NPF

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diperoleh hasil dengan arah positif, nilai t statistik sebesar 9,008024 dan t tabel sebesar 1,99547 (t statistik > t tabel) dan nilai probabilitas atau *p value* dari variabel kurs sebesar $0,0000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel kurs mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini berarti Kurs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Non*

³⁶Chandra Setiawan dan Monita Eggy Putri. Non Performing Financing and Bank Efficiency of Islamic Banks in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Business Research*. Volume 2 Nomor 1, 2013, hlm.69.

Performing Financing (NPF). Keadaan ini memberikan indikasi bahwa Kurs akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan *Non Performing Financing* (NPF). Kenaikan dan penurunan dari Kurs akan membawa pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Semakin rendah Kurs akan memberikan kontribusi terhadap semakin rendahnya *Non Performing Financing* (NPF) atau dengan kata lain, semakin rendahnya Kurs akan membawa pengaruh terhadap rendahnya *Non Performing Financing* (NPF). Dan sebaliknya semakin tinggi Kurs akan membawa pengaruh terhadap tingginya *Non Performing Financing* (NPF).

Pada dasarnya kurs mata uang (perbandingan harga atau nilai tukar dua valuta atau lebih) dikatakan sesuai atau tepat jika dibandingkan sama dengan daya beli valuta itu. Nilai barang diukur dengan uang, yaitu harga sedangkan nilai uang diukur dengan barang, yaitu daya belinya. Jika harga barang naik, maka lebih banyak uang yang diperlukan untuk membeli barang yang sama, hal itu berarti nilai uang telah merosot. Sedangkan jika mata uang di suatu negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan valuta lain (kurs resmi lebih tinggi daripada perbandingan daya beli yang sesungguhnya), ekspor akan mengalami kemacetan dan impor cenderung terlalu besar sehingga keseimbangan neraca pembayaran terancam. Hal sebaliknya terjadi apabila mata uang dinilai terlalu rendah, apabila kurs resmi terlalu rendah dibandingkan dengan daya beli yang sesungguhnya, maka ekspor akan bertambah besar tetapi impor akan mengalami kemacetan.³⁷

Menurut Mutamimah dan Siti³⁸, perubahan kurs mata uang juga akan sangat mempengaruhi kelancaran usaha nasabah. Jika nilai rupiah jatuh dibandingkan dengan valuta asing dan jika usaha tersebut dijalankan menggunakan bahan impor, maka akan memukul usaha nasabah sehingga akan mengurangi kemampuan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya kepada bank.

³⁷T.Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2004, hlm. 305.

³⁸Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah. Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Volume 19 Nomor 1 ISSN 1412-3126, 2012, hlm 59.

Menurut Sadono Sukirno³⁹, semakin tinggi kurs, semakin tinggi NPF karena kurs sangat penting dalam transaksi internasional hal ini berkaitan dengan sektor ekspor. Jika kurs tinggi, nilai rupiah juga tinggi sehingga semakin banyak nilai rupiah yang dikeluarkan masyarakat dan mengurangi upaya mereka dalam melunasi hutangnya. Karena adanya kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dollar yang tinggi akan mengakibatkan nilai rupiah menurun dalam arti semakin banyak rupiah yang akan dikeluarkan untuk suatu transaksi, hal tersebut akan berdampak secara langsung terhadap masyarakat. Bagi mereka yang telah mempunyai angsuran pembiayaan pada bank syariah, akan cenderung tidak memenuhi kewajibannya. Hal itu yang akan menyebabkan tingginya tingkat NPF.

Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan “Kurs secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*” dinyatakan diterima. Hasil ini senada dengan penelitian Ali dan Iva pada tahun 2013 yang menunjukkan Kurs berpengaruh positif signifikan terhadap NPL.

3. Pengaruh Inflasi terhadap NPF

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diperoleh hasil dengan arah positif, nilai t statistik sebesar 0.079072 dan t tabel sebesar 1,99547 (t statistik < t tabel) dan nilai probabilitas atau *p value* dari variabel inflasi sebesar $0.9372 > 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini berarti Inflasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Keadaan ini memberikan indikasi bahwa kenaikan dan penurunan Inflasi tidak akan membawa pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mobilisasi dana melalui

³⁹Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Makroekonomi: Edisi Kedua*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 358

lembaga keuangan formal.⁴⁰ Adanya inflasi memberikan dampak yang dirasakan oleh para penabung, kreditur atau debitur, dan produsen. Bagi para penabung, inflasi menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank. Bagi debitur atau yang meminjamkan uang kepada bank, inflasi justru menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada bank nilai uang lebih rendah dibanding saat meminjam maka sebaliknya pihak bank akan mengalami kerugian.⁴¹

Salah satu akibat penting dari adanya inflasi adalah akan cenderung menurunkan taraf kemakmuran sebagian besar masyarakat. Sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja-pekerja yang mempunyai penghasilan tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja, oleh sebab itu upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini berarti menjadikan tingkat kemakmuran sebagian besar masyarakat mengalami kemerosotan.⁴²

Menurut Marissya⁴³, dengan berjalannya waktu, harga-harga semua bahan baku mengalami kenaikan dan diiringi pula dengan kenaikan kebutuhan masyarakat tetapi hal itu tidak ditunjang dengan kenaikan pendapatan. Hal tersebut yang menyebabkan sebagian besar masyarakat memikirkan alternatif lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan mengajukan kredit/pembiayaan pada bank. Namun pengajuan pembiayaan oleh nasabah itu tidak akan dengan mudah dikabulkan oleh pihak bank. Karena suatu bank harus memperhatikan serta mengamati secara jelas asal usul debitur sebelum menyepakati perjanjian. Sejalan dengan tingginya kurs, maka inflasi juga akan mengalami kenaikan. Di satu sisi, bagi nasabah pemilik angsuran pembiayaan pada bank syariah akan kesulitan memenuhi kewajibannya yang

⁴⁰Nurul Huda et al. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.175.

⁴¹Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Makro Islami*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.169.

⁴²Sadono Sukirno. *Op.cit.*, hlm. 16

⁴³Marissya Halim. Faktor Internal dan Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Non Performing Financing di Bank Pemerintah dan Bank Swasta Jawa Timur Periode 2008-2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Volume 4 Nomor 2, 2015, hlm.14.

menyebabkan NPF tinggi namun di sisi lain, nasabah pemilik tabungan akan lebih memilih tidak menggunakan uang dan tetap menyimpan dananya di bank yang berarti walaupun NPF tinggi tetapi bank syariah masih mempunyai pendapatan yang besar.

Dengan demikian, hipotesis 3 yang menyatakan “Inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*” dinyatakan ditolak. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Marissya pada 2015 yang menyatakan Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF, berbeda dengan penelitian Mohammad pada 2013 yang menyebutkan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

4. Pengaruh FDR, Kurs, dan Inflasi secara bersama-sama terhadap NPF

Berdasarkan tabel uji F diatas, terlihat bahwa besarnya nilai F statistik 77,88 dan F tabel sebesar 2,74 ($F \text{ statistik} > F \text{ tabel}$) dengan tingkat signifikansi $0,000000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kurs, dan Inflasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Variabel-variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kurs, dan Inflasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia. Keadaan ini menunjukkan bahwa penggabungan variabel-variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kurs, dan Inflasi relevan digunakan untuk memprediksi variabel pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia. Sedangkan apabila dilihat dari besarnya pengaruh dari hasil nilai t statistik variabel-variabel independen pada tabel 4.8. dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel tersebut variabel kurs merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Haifa dan

Wibowo yang menyatakan bahwa FDR, inflasi dan kurs memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF.⁴⁴

Dengan demikian, hipotesis 4 yang menyatakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kurs, dan Inflasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia dinyatakan diterima. Karena secara garis besar baik variabel FDR, Kurs, maupun Inflasi sama-sama mempunyai pengaruh secara langsung terhadap NPF.



⁴⁴Haifa dan Dedi Wibowo. Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Makro Ekonomi Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010:01 – 2014:04. *Jurnal Nisbah*. Volume 1 Nomor 2, 2015, hlm.84-85.